

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**



**LAKIP**

**KECAMATAN PUGER**

**Tahun  
2024**

**KANTOR KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER  
Tahun 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Puger disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Puger ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Puger berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Puger. Kinerja Kecamatan Puger diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2024.

**Jember, 20 Februari 2025**

**CAMAT PUGER**



**SUBAGIYO, SP**

Penata Tingkat I

NIP.19690106 199402 1 00

## DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. LATAR BELAKANG .....	8
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	9
BAB II.....	18
A. RENCANA STRATEGIS.....	18
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	21
C. PERJANJIAN KINERJA .....	25
D. ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN TAHUN 2024 .....	27
BAB III .....	29
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 .....	29
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PUGER.....	30
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN .....	35
D. ANALISIS ATAS SUMBER DAYA.....	48
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	49
F. ANALISIS ANGGARAN .....	54
BAB IV .....	58
PENUTUP .....	58
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2024 (jika ada)</b>	

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kinerjanya.

Sasaran yang dituju adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Dalam Upaya mencapai target sasaran maka rencana strategis yang dibangun ada 4 program kebijakan terdiri dari 9 kegiatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran yaitu Nilai ( 90 %) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada akhir RPJMD bernilai B (baik).

Kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusia (Aparatur) yang belum mencukupi secara kualitas dan kuantitas. Pendekatan Kerjasama dengan pemerintahan kabupaten, dinas sektoral, swasta dan pihak ketiga adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan.

Laporan Kinerja Kecamatan Puger disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Puger tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puger Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2024.

target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puger Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2024.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Puger.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Puger tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan 6 indikator sasaran menunjukkan capaian predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- -Penyebab keberhasilan antara lain mudahnya koordinasi secara internal dan eksternal
  - Solusi terhadap kendala kedepan adalah saling koordinasi memperbaiki sistem yang ada di dalam OPD
  - Rencana perbaikan kedepan koordinasi untuk sarana dan prasarana ditingkatkan
  - Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain pengarsipan dokumen secara tertib dan teratur
- -Penyebab keberhasilan antara lain pelayanan tepat waktu pada masyarakat
  - Solusi terhadap kendala kedepan adalah sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai
  - Rencana perbaikan kedepan pelayanan pada masyarakat mudah dan lancar

- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain pelayanan Turba (turun ke bawah) tepat sasaran pada masyarakat dan bersinergi dengan pihak terkait
- -Penyebab keberhasilan antara lain mudahnya koordinasi dengan wilayah dan masyarakat
  - Solusi terhadap kendala kedepan adalah penambahan atas kurangnya SDM program pemberdayaan masyarakat
  - Rencana perbaikan kedepan apa bersinergi bersama PKH, Sahabat Tagana, PKK, dan Pemdamping Desa serta koordinasi dengan pihak terkait
  - Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pendapatan
  - Rencana perbaikan kedepan dengan mengurangi resiko dalam menghadapi masalah dan kesulitan serta prediksi waktu yang efektif dan terencana
  - Inovasi dn / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain memberdayakan penggunaan teknologi, kolaborasi terbuka, pengembangan kemitraan, pengembangan kapasitas, motivasi kepada staf yang kurang kompeten untuk mengembangkan diri, penggunaan data dan analisis terpadu.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Puger tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di Kecamatan

Sasaran 3 : Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat Kecamatan

Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien

Sasaran 6 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat

daerah

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Pada Kecamatan Puger telah dilaksanakan dengan baik, dan dapat disimpulkan adanya kinerja nyata dalam tim dan OPD terkait dengan meningkatkan komitmen dan dedikasi dalam bekerja keras mencapai tujuan dalam rangka pengukuran kinerja bertahan semakin lebih baik di masa yang akan datang.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada Kecamatan Puger telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 6 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Tinggi** dan dapat disimpulkan adanya kinerja nyata dalam tim yang efektif dengan meningkatkan komitmen dan dedikasi dalam bekerja keras mencapai tujuan rangka pengukuran kinerja bertahan semakin lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 63% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp. 4.387.422.328 dan terealisasi sebesar Rp.3.728.727.684,- ( 84,99 %) dan Belanja Modal sebesar Rp.42.920.100,- terealisasi sebesar Rp.42.700.00,- ( 99,49%)

Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan keterbatasan pegawai yang kompeten mempengaruhi kerja tim, sehingga anggaran tidak terserap maksimal.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. kerja sama tim
2. pengelolaan sumberdaya dan keuangan yang efektif dan efisien
3. Komunikasi yang efektif

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain:

1. Sumber daya (staf, anggaran, peralatan) kurang efektif ditingkatkan sehingga saling melengkapi

2. Terjaga keseimbangan dalam segala aspek saling melengkapi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Puger diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Puger tahun 2024

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Puger dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Puger adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Puger
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PUGER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Puger diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Puger merupakan unsu perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan

pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum.

(2) Kecamatan Puger dipimpin oleh Subagiyo yang berkedudukan Camat

Puger, Zaenal Arifin berkedudukan sebagai Sekretaris Camat, Isma Hidayati berkedudukan sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian, Vidia Daniati berkedudukan sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Seksi Pemerintahan, Hastian Mukminin berkedudukan sebagai Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Yeni Herawati berkedudukan sebagai Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial.

(3) Kecamatan Puger mempunyai tugas

a. Camat mempunyai tugas;

1. menyelenggarakan urusan pemerintah umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
9. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan

keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

a) Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan, pengelola asset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan.

c. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan Camat, desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas antara lain:

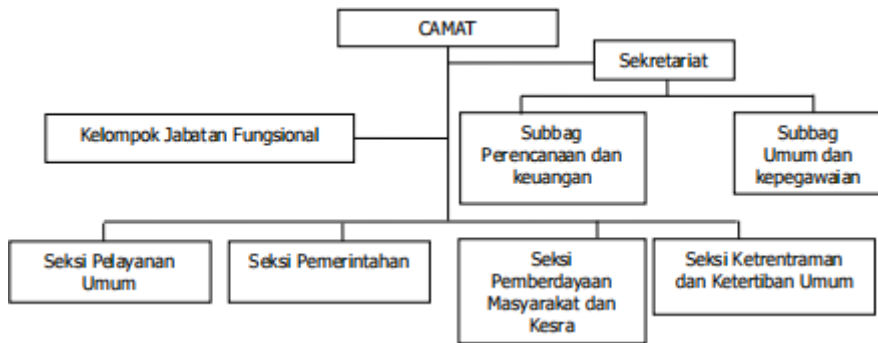
- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasaranan umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(4) Susunan organisasi Kecamatan Puger terdiri dari :



#### D. SUMBER DAYA MANUSIA Kecamatan Puger

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Puger yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Puger yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *update* melalui SIMPEG sebanyak 12 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 21 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 9 orang atau 43 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Puger Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada							L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Administrasi														

1. Administrator	1			1		1					1		1	-
2. Pengawas	7			7		5			1		4		1	4
3. Pelaksana	13	7		6		6	1		5				6	-
Jabatan Fungsional													-	-
Non ASN						18	1	2	12	1	2		16	2
Jumlah	21	7		14		30	1	2	18	1	7		24	6

**Sumber** : Data Kepegawaian Kecamatan Puger 2024

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan besetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Puger belum memenuhi/ sudah memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Puger

#### E. SARANA PRASARANA Kecamatan Puger

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Puger menempati gedung di Jl Pantai No. 93, Puger.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Puger (Cukup / kurang) memadai. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Puger adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Puger**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Televisi	1	Baik	1 unit
2	Kursi Tunggu	1	Baik	1 Unit
3	Tanah Bangunan Gedung	1	Baik	1
4	Tanah Bangunan	1	Baik	1

	Gedung			
5	Kursi Camat	1	Baik	1
6	Kursi Hadap Camat	8	Baik	8
7	Meja Kursi Camat	1	Baik	1
9	Meja tamu persegi Panjang	3	Baik	3
9	Sofa single camat	4	Baik	4
10	Sofa double camat	2	Baik	2
11	Lemari backdroup camat	2	Baik	2
12	Meja Bundar Camat	1	Baik	1
13	Kursi Sekcam	1	Baik	1
14	Meja kursi Sekcam	1	Baik	1
15	Meja samping sekcam	1	Baik	1
16	Rak buku sekcam	5	Baik	5
17	Sofa single camat	3	Baik	3
18	Sofa double camat	2	Baik	2
19	Kursi Staff	25	Baik	25
20	Meja kerja kasi	6	Baik	6
21	Meja kerja staff	25	Baik	25
22	Rak Buku	24	Baik	24
	<b>Jumlah</b>			<b>119</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Puger Tahun 2024

## F. ANGGARAN Kecamatan Puger

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Puger pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Puger memiliki 4Program, 12Kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.430.342.428,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**TABEL 1.4 Anggaran Kecamatan Puger**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp,-)</b>
1	<b>Program</b> penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp3.730.553.028
1.1	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 2.299.742.427
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.186.342.427
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 113.400.000
1.2	<b>Kegiatan</b> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 2.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 2.000.000
1.3	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp76.128.201
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6.929.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp10.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 27.725.500
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 15.033.600
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.750.101
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 11.690.000
1.4	<b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	Rp 4.776.100
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Mebel	Rp 4.776.100
1.5	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.200.739.600
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 30.081.600
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.170.658.000
1.6	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 151.942.800
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 32.325.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 50.815.800
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 45.000.000

	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 23.802.000
2	<b>Pogram</b> Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 49.100.000
2.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 33.600.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 33.600.000
2.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 4.500.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 4.500.000
	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp. 11.000.000
2.3	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp. 11.000.000
3	<b>Program</b> Koordinasi Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 121.492.000
3.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 121.492.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Rp. 37.680.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 83.812.000
4	<b>Program</b> Koordinasi Ketenaytraman dan Ketertiban Umum	Rp. 486.277.300
4.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 482.757.300
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 482.757.300
	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.520.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 3.520.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.430.342.428</b>

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Puger Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Puger dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Puger dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. SDM Pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
2. Pola pikir dan budaya/ etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/ wilayah
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kab Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Perencanaan tingkat Desa
8. Belum adanya peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan sosial dari Desa ke Masyarakat/ Kelompok Masyarakat

## **H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN**

Kecamatan Puger terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Selatan dengan luas wilayah Kecamatan Puger adalah berkisar  $\pm 160,06$  km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Balung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Wuluhan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Gumukmas

Jumlah pendudukan di Kecamatan Puger sebanyak 125.331 jiwa dengan laki-laki 63.388 jiwa dengan persentase 49,85% penduduk perempuan 61.060 jiwa dengan persentase 50,15%. Penduduk Kecamatan Puger memiliki mata pencaharian antara lain:

1. Nelayan 4.676 Jiwa
2. Petani/ Peternakan 20.275 Jiwa
3. Wiraswasta 29.058 Jiwa
4. Pelajar 15.197 Jiwa
5. Aparatur/ Pejabat Negara 788 Jiwa
6. Guru 1.020 Jiwa
7. Bidang Agama 32 Jiwa
8. Tenaga Kesehatan 174 Jiwa
9. Pensiunan 231 Jiwa
10. Pengangguran 31.256 Jiwa
11. Lainnya 22.789 Jiwa

Secara administratif Kecamatan Puger membawahi 12 Desa yaitu:

1. Desa Bagon
2. Desa Mlokorejo
3. Desa Wringintelu
4. Desa Jambearum
5. Desa Wonosaro
6. Desa Kasiyan Timur
7. Desa Kasiyan
8. Desa Grenden
9. Desa Mojosari
10. Desa Mojomulyo
11. Desa Puger Kulon
12. Desa Puger Wetan

*Sumber Data : Kecamatan Puger dalam Angka (BPS) 2024*

Daftar Nama object wisata Kecamatan Puger

1. Pantai Getem

2. Pantai Puger

3. Cemoro Sewu

Potensi Bencana yang ada di Kecamatan Puger antara lain:

1. Tsunami

2. Banjir

3. Longsor

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Kecamatan Puger merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kabupaten Jember mempunyai Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Puger yaitu

Misi :

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Puger adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Puger**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1.Meningkatnya Efektifitas Pencapaian	Persentase Indikator Program yang Tercapai	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Target Kinerja Perangkat Daerah							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Tabel TC-25 Kecamatan Puger tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik

Indikator Tujuan 2 : Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1.Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	IKM	90	90	90	90	90	90
2.Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Kecamatan Puger tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>IKU</b>	<b>Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>
1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	Tersedianya 4 dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah 1. Dokumen Lakip 2. Dokumen Anjab (Antara lain berupa dokumen anjab beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) 3. Dokumen penataan organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan system kerja 4. Dokumen Pelayanan Publik dan tata laksana (antara lain berupa dokumen standar pelayanan, dokumen SOP pelayanan public, laporan survey kepuasan masyarakat, laporan forum konsultasi public/FKP, Peta proses bisnis)	Camat	-
2. Meningkatnya	Indeks	1. IKM merupakan data	- Seksi	SUKMA-E

<p>kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan</p>	<p>Kepuasan Masyarakat</p>	<p>dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan system informasi (e-sukma)</li> <li>3. IKM berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya/tarif</li> <li>• Produk spesifikasi, jenis pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> </li> </ol>	<p>Pemerintah an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	
<p>3. Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat</p>	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b> Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang</p>	<p>- Seksi PMKS</p>	<p>Dokumen laporan fasilitasi kegiatan</p>

kecamatan	yang dilaksanakan	<p>difasilitasi... ..x100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p><b>Penjelasan :</b> Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitas penyaluran bantuan bahan/ alat.</p>		pemberdayaan masyarakat
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. x100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p><b>Penjelasan indikator:</b> -laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada WA, pengaduan SPAN lapor</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		ataupun media sosial kecamatan		
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	1. Nilai SAKIP PD adalah nilai hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada permenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan pedoman evaluasi internal di Pemkab Jember	Camat	LHE AKIP-PD
6. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai..... x 100% Jumlah indikator program Indikator program adaah seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kecamatan Puger no 12 tentang indikator kinerja utama kecamatan puger

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di kecamatan	IKM	90
3	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Presentase Fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Presentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta kesejahteraan masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (64)

6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%
---	---	--	------

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024  
Rp 3.773.473.128 Sumber Dana : APBD
  2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2024  
Rp 49.100.000 Sumber Dana : APBD
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024  
Rp 121.492.000 Sumber Dana APBD
  4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024  
Rp 486.277.300 Sumber Dana APBD
- Jumlah Rp. 4.430.342.428**

#### D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Puger terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- ProgramProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun dengan Anggaran Rp 3.773.473.128

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 3.773.473.128 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Puger

- b) Sasaran Strategis II : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan

Didukung oleh :

- ProgramPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp 49.100.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 49.100.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Puger

c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp 121.492.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp121.492.000 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Puger

d) Sasaran Strategis IV : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp 486.277.300

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 486.277.300 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Puger

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Puger dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Puger menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA Kecamatan Puger

Kecamatan Puger telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Puger dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%	88%	97%	90%	97%

2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	100%	90	100%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	90%	90%	100%	90%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	90%	90%	100%	90%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	60	60	100	70	85
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	90%	90%	90%	90%	90%

Sumber Data Realisasi : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 4 indikator sasaran Kecamatan Puger rata rata mencapai 90% dan masuk dalam kategori tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan kinerja tinggi Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Puger telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pelayanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Puger tahun 2021 -2026. Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	90	90
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	90%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B(61)	B(62)	B(63)	B(64)

Meningkatnya pencapaian target perangkat daerah	efektifitas kinerja	Persentase indikator program yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100%
---	---------------------	--	-------	-------	-------	------

Sumber Data Realisasi : Kinerja Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang stabil sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang stabil sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang stabil sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang stabil sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang stabil sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Puger dengan Realisasi Nasional/  
Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	4 Dok	-	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di kecamatan	IKM	90	87,33(IKM Kab Jember)	
3	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Presentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang Dilaksanakan	90%	-	
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Presentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta kesejahteraan Masyarakat	100%	-	
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (64)	62,50 (Sakip Kab Jember)	
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%	n/a	

Realisasi kinerja atas indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran ( Rp,- )	Realisasi ( Rp,- )	% Serapan Anggaran
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.299.742.427</b>	<b>1.814.284.817</b>	<b>78,89</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.186.342.427	1.734.004.817	<b>79,31</b>
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.400.000	80.280.000	<b>70,79</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>114.272.201</b>	<b>77.445.950</b>	<b>67,77</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.929.000	6.725.000	<b>97,06</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.869.500	58.226.500	<b>88,40</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.033.600	8.608.900	<b>57,26</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.750.101	3.885.550	<b>81,80</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	11.690.000	-	-

	SKPD			
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.776.100</b>	4.700.000	<b>98,41</b>
	Pengadaan Mebel	4.776.100	4.700.000	<b>98,41</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.200.739.600</b>	<b>1.178.872.867</b>	<b>98,18</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.081.600	27.093.017	<b>90,07</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.170.658.000	1.151.779.850	<b>98,39</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151.942.800</b>	<b>119.961.050</b>	<b>78,95</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.815.800	47.209.650	<b>92,90</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.325.000	29.848.400	<b>92,34</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	42.903.000	<b>95,34</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.802.000	-	-
<b>Total</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.773.473.128</b>	<b>3.195.264.684</b>	<b>84,68</b>
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			

Kecamatan				
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>33.600.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>58,33</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.600.000	19.600.000	<b>58,33</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>33</b>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.500.000	1.500.000	<b>33,33</b>
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>11.000.000</b>	-	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11.000.000	-	-
<b>Total</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>49.100.000</b>	<b>21.100.000</b>	<b>42,97</b>
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>121.492.000</b>	<b>99.348.000</b>	<b>81,77</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	37.680.000	21.398.000	<b>56,79</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	83.812.000	77.950.000	<b>93,01</b>

	Kecamatan			
<b>Total</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>121.492.000</b>	<b>99.348.000</b>	<b>81,77</b>
Sasaran 4 Tercapainya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>482.757.300</b>	<b>449.045.000</b>	<b>93,02</b>
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>482.757.300</b>	449.045.000	93,02
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>100</b>
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.520.000	3.520.000	<b>100,00</b>
<b>Total</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>486.277.300</b>	<b>452.565.000</b>	<b>93,07</b>

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
----------------------	--------	--------	-----------

Input	Jumlah Dana	Rp 2.186.342.42	100%	1.734.004.817 (79%)
Output	Jumlah Orang y menerima gaji tunjangan ASN	Orang/ Bulan	18 Ora Bulan	18 Orang/ Bula

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi

Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 113.400.000	100%	80.280.000
Output	Jumlah Doku Penatausahaan Pengujian/ Verifi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	11 Dokumen

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

	Uraian Input/ Out	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 6.929.000	2 Paket	6.725.000
Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka yang Disediakan	Paket	2 Paket	2 Paket

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Out	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 10.000.000	100%	0

Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7 Paket	0
--------	--	-------	---------	---

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

	Uraian Input/ Out	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 65.869.500	100%	Rp. 58.226.500
Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	Uraian Input/ Out	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 15.033.600	100%	Rp. 8.608.900
Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan

	Uraian Input/ Outp	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 4.750.101	100%	Rp. 3.885.550
Output	Jumlah Paket Bar Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 11.690.000	100%	Rp. 0
Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0

Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

**Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 4.776.100	100%	Rp. 4.700.000
Output	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket

Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 30.081.600	100%	Rp. 27.093.017
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11 Laporan

Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Output	In Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 1.170.658.000	100%	Rp. 1.151.779.850
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Lapo	11 Laporan

Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**

**Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Output	In Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 50.815.800	100%	Rp. 40.809.650
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Kendaraan	1	1 Kendaraan

Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**

**Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Output	In Satuan	Target	Realisasi
--	------------------	--------------	--------	-----------

	Output			
Input	Jumlah Dana	Rp 32.325.000	100%	Rp. 32.248.400
Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Kendaraan	1	1 Kendaraan

Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**

**Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Output	In Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 45.000.000	100%	Rp. 36.103.000
Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	35 Paket	35	35 Paket

Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**

**Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 23.802.000	100%	Rp. 0
Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	0

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan adalah sebagai berikut :

**2. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Output	In Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 33.600.000	100%	Rp. 19.600.000
Output	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dok	12	12 Dok



Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan  
 Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Output	In Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 4.500.000	100%	Rp. 1.500.000
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Lap	12	4 Lap

	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
--	--	--	--	--

Kegiatan: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan parasarana pelayanan umum

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 11.000.000	100%	Rp. 0
Output	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dok	12	0 Dok



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

### 3. Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 37.680.000	100%	Rp. 21.398.000
Output	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Dok	12	12 Dok



Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 83.812.000	100%	Rp. 78.130.000
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lap	12	11 Lap



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

**4. Program: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp 482.757.300	100%	Rp. 449.045.000
Output	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Lap	12	11 Lap



#### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Puger berjumlah 30 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.430.342.428, melaksanakan 4 program, 9 kegiatan dan 13 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	97 %	84,68%	Efisien
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	100 %	42,97%	Efisien
3. Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan	90%	81,77%	Efisien
4. Tercapainya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	90%	93,07%	Tidak Efisien
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	85%	64%	Efisien

dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien			
6. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	90%	90%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dapat dikategorikan efisien karena 97% capaian kinerja lebih besar daripada 84,68% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 42,97% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan dapat dikategorikan efisien karena 90% capaian kinerja lebih besar daripada 81,77% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: Tercapaian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan dapat dikategorikan tidak efisien karena 90% capaian kinerja lebih kecil daripada 93,07% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien dapat dikategorikan efisien karena 85% capaian kinerja lebih besar daripada 64% serapan anggaran

Capaian kinerja Sasaran 6 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dapat dikategorikan efisien karena 90% capaian kinerja sama dengan 90% serapan anggaran.

## **E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Analisis capaian kinerja Kecamatan Puger menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	97%	√				
Indikator 1.1 Persentase Indikator Program yang tercapai	97%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	<b>100%</b>	√				
Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	90%	√				
Indikator 3.1 Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
<b>Sasaran 4</b> Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman	90%	√				

masyarakat di Kecamatan						
Indikator 4.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	90%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	100%	√				
Indikator : Nilai SAKIP OPD	100%	√				
Rata rata Capaian	100%	√				
Sasaran 6 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	90%	√				
Indikator : Persentase indikator program yang tercapai	90%	√				
Rata rata Capaian	100%	√				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

### Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 97%,

- Penyebab keberhasilan antara lain mudahnya koordinasi secara internal dan eksternal
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah saling koordinasi memperbaiki sistem yang ada di dalam OPD

- Rencana perbaikan kedepan koordinasi untuk sarana dan prasarana ditingkatkan
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain pengarsipan dokumen secara tertib dan teratur

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

- Penyebab keberhasilan antara lain pelayanan tepat waktu pada masyarakat
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai
- Rencana perbaikan kedepan pelayanan pada masyarakat mudah dan lancar
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain pelayanan Turba (turun ke bawah) tepat sasaran pada masyarakat dan bersinergi dengan pihak terkait

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 90%,

- Penyebab keberhasilan antara lain mudahnya koordinasi dengan wilayah dan masyarakat
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah penambahan atas kurangnya SDM program pemberdayaan masyarakat
- Rencana perbaikan kedepan apa bersinergi bersama PKH, Sahabat Tagana, PKK, dan Pemdamping Desa serta koordinasi dengan pihak terkait

- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pendapatan

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 90%,

- Penyebab keberhasilan antara lain koordinasi dengan lintas sektor dan muspika plus berjalan dengan baik
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah saling koordinasi memperbaiki sistem yng adadi dalam OPD
- Rencana perbaikan kedepan koordinasi lebih ditingkatkan
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, peningkatan patroli wilayah, dan penertiban Pedagang Kaki Lima/ PKL

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran meningkanya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

- Penyebab keberhasilan antara lain koordinasi dengan selluruh staff dan OPD terkaitberjalan dengan baik
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah saling koordinasi memperbaiki sistem aplikasi yang ada di Kecamatan
- Rencana perbaikan kedepan koordinasi lebih ditingkatkan
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain meningkatkan keamanan aplikasi jangan sampai error

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 90%,

- Penyebab keberhasilan antara lain koordinasi dengan seluruh staff dan OPD terkait berjalan dengan baik
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah saling koordinasi memperbaiki sistem yang ada di dalam OPD
- Rencana perbaikan kedepan koordinasi lebih ditingkatkan
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain meningkatkan pelayanan sistem kepegawaian terutama dalam mencukupi kebutuhan pegawai

## F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Puger, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.430 342.428,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.387.422.328,- terealisasi sebesar Rp.3.728.727.684,- ( 84,99 %)
2. Belanja Modal sebesar Rp.42.920.100,- terealisasi sebesar Rp.42.700.00,- ( 99,49%)

**Tabel 3.8**

**Realisasi Anggaran Kecamatan Puger Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan/ Sub	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang pemerintahan Kabupaten / Kota	Urusan Daerah	Rp 3.773.473.128	Rp3.195.264.684	84,68%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp2.299.742.427	Rp1.814.284.817	78,89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 2.186.342.427	Rp 1.734.004.817	79,31%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Rp113.400.000	Rp80.280.000	70,79%
1.2	Kegiatan Administrasi Umum		Rp114.272.201	Rp77.445.950	67,77%

	Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6.929.000	Rp6.725.000	97,06%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 10.000.000	Rp -	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 65.869.500	Rp 58.226.500	88,40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 15.033.600	Rp 8.608.900	57,26%
	Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 4.750.101	Rp 3.885.550	81,80%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 11.690.000	Rp -	-
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 4.776.100	Rp4.700.000	98,41%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp 4.776.100	Rp 4.700.000	98,41%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.200.739.600	Rp1.178.872.867	98,18%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 30.081.600	Rp 27.093.017	90,07%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.170.658.000	Rp 1.151.779.850	98,39%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 151.942.800	Rp 119.961.050	78,95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp50.815.800	Rp47.209.650	92,90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp32.325.000	Rp29.848.400	92,34%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp45.000.000	Rp42.903.000	95,34%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 23.802.000	-	-

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 49.100.000	Rp 21.100.000	
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 33.600.000	Rp 19.600.000	58,33%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 33.600.000	Rp 19.600.000	58,33%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 4.500.000	Rp 1.500.000	33,33%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 4.500.000	Rp 1.500.000	33,33%
2.3	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp 11.000.000	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp 11.000.000	-	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 121.492.000	Rp 99.348.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 121.492.000	Rp 99.348.000	81,77%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Rp 37.680.000	Rp 21.398.000	56,79%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 83.812.000	Rp 77.950.000	93,01%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 486.277.300	Rp 452.565.000	
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Rp 482.757.300	Rp 449.045.000	93,02%

	Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penagakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 482.757.300	Rp 449.045.000	93,02%
4.2	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.520.000	Rp 3.520.000	100%
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 3.520.000	Rp 3.520.000	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 4.430.342.428</b>	<b>Rp 3.757.657.684</b>	<b>63%</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Puger Tahun 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Puger ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Puger sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Puger disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Puger telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 4 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 3 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 1 indikator tidak mencapai target dengan kategori tinggi

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

4. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai rencana
5. Pelaksanaan kegiatan di dukung oleh beberapa pihak

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Sarana prasarana dan anggaran tanpa adanya kendala maintenance
2. Kegiatan Pelayanan pada masyarakat mudah, lancar, dan tepat sasaran
3. Bersinergi dengan semua pihak
4. Koordinasi lebih ditingkatkan

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Puger yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

## LAMPIRAN I

### Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Puger Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1.Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Sumber : Tabel TC-25 Kecamatan Puger tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik

Indikator Tujuan 2 : Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1.Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	IKM	90	90	90	90	90	90
2.Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	dilaksanakan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CAMAT PUGER



SUBAGIYO, SP  
Penata TK. I  
NIP. 196901061994021002

## LAMPIRAN II



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN PUGER

Jl. Pantai No. 93 Kode Pos 68164

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

**RPJMD**

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintah yang kondusif antara eksekutif, legislative dan masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Nilai SAKIP

**RKT**

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang	Nilai SAKIP OPD	1. Meningkatnya efektifitas Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%				

profesional, efektif, dan efisien					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggung jawaban keuangan	12 Laporan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	2.186.342.427
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	113.400.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi tingkat kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.815.800
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	32.325.000

								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	45.000.000
								Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	23.802.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 Laporan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	6.929.000
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	10.000.000
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	65.869.500
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.033.600
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	4.750.101

								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11.690.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi dan SDA dan Listrik	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.081.600
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.170.658.000
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan aset	12 Laporan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	4.776.100

nya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana penyelenggaraan dan pelayanan publik	Dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	kepuasan Masyarakat	penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	garakan nya pemerintah dan pelayanan public di tingkat kecamatan						
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahu	12 Dokumen	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	33.600.000	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase masyarakat tertib administrasi kependudukan	100%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.500.000	
				Koordinasi Pemeliharaan Prasaranad	Jumlah Dokumen koordinasi / sinergi	12 Dokumen	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan	12 Dokumen	11.000.000	

				an Sarana Pelayanan Umum	dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		
		3. Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan desa dan kelurahan	100%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan Kesos (Musrenbang dan PKK)	12 LK	Peningkatan Partisipasi masarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	12 LK	37.680.000

								Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	83.812.000
		4. Terjaganya Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	Presentase Tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran	100%	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	100%				
					Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang dan/ atau kepolisian dan/ atau Kepolisian negara republic Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang dan/ atau kepolisian republic indonesia	12 Laporan	482.757.300

					Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2 Laporan	3.520.000
--	--	--	--	--	--	---	------	--	---	-----------	-----------

Jember, 3 Juli 2024  
CAMAT PUGER



**SUBAGIYO, SP**  
NIP. 19590106 199402 1 002

### LAMPIRAN III



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PUGER**  
Jl. Pantai No 93 Telp. 0336 - 721447 Puger Kode Pos. 68164

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU WIDAGDO, SP. M.Si.

Jabatan : Camat Puger

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER**  
  
Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Pihak Pertama  
**CAMAT PUGER**  
  
HERU WIDAGDO, SP. M.Si.  
NIP. 19660105 199803 1 004

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN PUGER

NO (1)	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (64)
6.	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.773.473.128	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 49.100.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 121.492.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum	Rp. 486.277.300	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.430.342.428</b>	<b>APBD</b>

**BUPATI JEMBER**  
  
Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024  
**CAMAT PUGER**  
  
HERU WIDAGDO, SP. M.Si.  
NIP. 19660105 199803 1 004

## LAMPIRAN IV



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
KECAMATAN PUGER  
Jl. Pantai No 53, Puger, Jember  
Laman [scc.puger@jemberkab.go.id](http://scc.puger@jemberkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT PUGER**  
KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 065/5/7/05.09.08/2024

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Puger;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengesahan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;  
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;  
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember  
KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diklum KESATU tersebut dalam lampiran;  
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diklum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :  
(1) Membtwikas informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi  
(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diklum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam :  
a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah  
b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah  
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah  
d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah  
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diklum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Puger Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Camat Puger ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Puger  
pada tanggal : 19 Agustus 2024



**CAMAT PUGER**  
**KABUPATEN JEMBER**  
SUHAGIYO, SP  
Jl. Tala TK 1  
Jember 66155  
Telp 030 196402 1 002

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PUGER

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya 4 dokumen penataan organisasi pemerintah daerah 1. Dokumen Lakip 2. Dokumen Anjab (Antara lain berupa dokumen anjab beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) 3. Dokumen penataan organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan system kerja	Camat	-

		4. Dokumen Pelayanan Publik dan tata laksana (antara lain berupa dokumen standar pelayanan, dokumen SOP pelayanan public, laporan survey kepuasan masyarakat, laporan forum konsultasi public/FKP, Peta proses bisnis)		
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan system informasi (e-sukma) 3. IKM berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan	- Seksi an - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

		<p>survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya/tarif</li> <li>• Produk spesifikasi, jenis pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penangan</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<p>an pengaduan, saran, dan masukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
3. Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat kecamatan	Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat kecamatan yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : -</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi.....x100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan : Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitas penyaluran bantuan bahan/ alat.</p>	- Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. x100%</p> <p>Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator: -laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada WA, pengaduan SPAN lapor ataupun media sosial kecamatan</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan	Nilai SAKIP OPD	1. Nilai SAKIP PD adalah nilai hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD	Camat	LHE AKIP- PD

aspek daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		<p>yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada permenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan pedoman evaluasi internal di Pemkab Jember</p>		
6. Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Jumlah indikator program yang tercapai..... x 100%</p> <p>Jumlah indikator program</p> <p>Indikator program adalah seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kecamatan Puger no 12 tentang Indikator kinerja utama kecamatan pugur

